

ABSTRAK

Kemiskinan pedesaan telah menjadi isu sentral dalam perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan publik dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan masih belum memberikan hasil yang baik. Sektor non-pertanian merupakan sektor yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan namun dalam pengembangannya kurang didorong oleh kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam penyusunan perencanaan tata ruang (Sugiri, Buchori dan Soetomo 2011). Kondisi tersebut terjadi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Wilayah pedesaan di Kecamatan Sukorejo merupakan wilayah dengan potensi non-pertanian pedesaan (rural non-farm). Dalam pengembangannya, wilayah pedesaan ini tentunya difasilitasi oleh perencanaan tata ruang berupa RTRW dan rencana tata ruang yang lain yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Dengan demikian, diperlukan adanya kajian untuk mengetahui bagaimana perencanaan tata ruang dapat memfasilitasi secara lebih baik pengembangan sektor ini sehingga muncul *Research Question* yaitu :“bagaimana perencanaan tata ruang dapat memfasilitasi secara lebih baik pengembangan kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Sukorejo?”

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis yaitu analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu didasarkan pada sumber data yang diperoleh dari data primer melalui observasi lapangan, wawancara, serta FGD. Di samping itu juga dilengkapi dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari telaah dokumen.

Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Sukorejo telah mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran bagi masyarakat lokal. Kegiatan non-pertanian yang berkembang cukup beragam dan memiliki keterkaitan yang baik dengan sektor primer. Berdasarkan peran rencana tata ruang dalam memfasilitasi kegiatan non-pertanian menurut struktur ruang hanya menjelaskan jangkauan pelayanan berdasarkan fungsi pelayanan kawasan. Konektivitas wilayah sebagai pendukung dalam pengembangan kegiatan ini belum dipertimbangkan. Sedangkan berdasarkan pola ruang, penjabaran hanya terbatas pada zonasi kawasan lindung dan budidaya. Intensitas kegiatan non-pertanian hanya untuk diferensiasi kegiatan berdasarkan jenisnya saja seperti untuk jenis industri dan pariwisata. Dari keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masih sangat minim. Tingkat partisipasi masyarakat menurut tipologi Arnstein masuk dalam kategori Consultation (konsultasi), atau termasuk dalam derajat tokenisme/ penghargaan. Selain itu, dari konstruksi masyarakat menunjukkan bahwa arahan yang terdapat dalam rencana tata ruang kurang konsisten dan kurang menguntungkan bagi masyarakat pelaku kegiatan non-pertanian.

Dapat disimpulkan bahwa peran rencana tata ruang yaitu RTRW Kabupaten Kendal 2011-2033 dan RDTR Kecamatan Sukorejo 2014-2034 bersifat menghambat bagi pengembangan kegiatan non-pertanian pedesaan di Kecamatan Sukorejo. Dengan demikian, Agar dapat memfasilitasi secara lebih baik, diperlukan perbaikan penyusunan perencanaan tata ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang lebih sesuai dan lebih mendukung kegiatan non-pertanian yaitu dikaji dari proses input, produksi, dan distribusi dalam aspek ruang sehingga jika dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci : Perencanaan tata ruang, pengentasan kemiskinan, kegiatan non-pertanian pedesaan, partisipasi masyarakat